

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. UMKM memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor dan sebagai subkontraktor yang menyediakan berbagai input bagi usaha yang berskala besar sekaligus sumber inovasi. Berbeda dengan di negara-negara maju, pentingnya UKM di negara-negara sedang berkembang seringkali lebih dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi maupun sosial yaitu: mengurangi pengangguran, pemberantasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan (Sulistiyastuti, 2004).

Keberadaan UKM di negara berkembang seperti di Indonesia adalah untuk mengeliminasi ketimpangan yang diakibatkan oleh proses pembangunan yang tidak merata, terutama karena terjadinya bias pembangunan perkotaan yang menyebabkan daerah pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding dengan daerah perkotaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan beberapa peran penting di Indonesia. Beberapa perannya yaitu: (1). UMKM pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, (2). Penyedia kesempatan kerja, (3). Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat, (4). Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan

sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan, (5). Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non-migas (Urata, 2000).

1. UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2015 UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Bisnis UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala

usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

2. UMKM di Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 triwulan IV selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah UMKM Produksi (bukan pertanian) sejumlah 20.343 unit usaha. Tahun 2009 sebanyak 20.682 unit, tahun 2010 sebanyak 21.205 unit, tahun 2011 sebanyak 23.374 unit, tahun 2012 sebanyak 26.171 unit, tahun 2013 sebanyak 30.103

unit, tahun 2014 sebanyak 34.309 unit, tahun 2015 sebanyak 38.084 dan tahun 2016 sebanyak 39.799 unit.

Peningkatan jumlah pengusaha UMKM merupakan salah satu hasil dari program pemerintah di dalam menumbuhkan ekonomi kreatif. Peningkatan jumlah unit usaha di setiap tahunnya di Provinsi Jawa Tengah diharapkan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi. Investasi yang terserap akan dapat membantu pengusaha UMKM untuk meningkatkan jumlah produksinya dan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

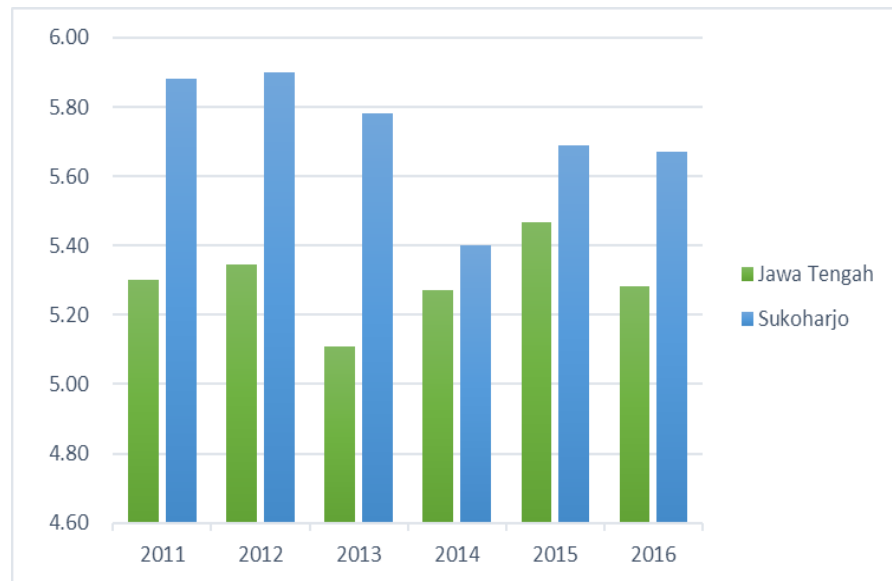
3. UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Industri kecil atau usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sukoharjo jumlahnya sangat banyak, dari industri agro dan hasil hutan, industri tekstil dan aneka dan industri kimia, logam, mesin dan elektro. Jumlah tertinggi yaitu industri kimia, logam, mesin dan elektro pada tahun 2015 sebanyak 16.609 usaha yang tahun sebelumnya hanya berjumlah 5.395 unit. Industri agro dan hasil hutan jumlahnya banyak setelah industri kimia, logam, mesin dan elektro yaitu sebanyak 6.857 unit usaha pada tahun 2014 dan 6.881 unit usaha pada tahun 2015. Industri tekstil dan aneka pada tahun 2014 sebanyak 4.312 unit dan tahun 2015 sebanyak 4.323 unit. Unit industri besar dan menengah jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan usaha kecil (usaha mikro, kecil dan menengah).

Indikator perekonomian suatu daerah dapat ditunjukkan melalui perkembangan jumlah PDRB. Fokus pembangunan ekonomi nasional selalu menggunakan tumpuan yang bersifat regional dalam pelaksanaan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, oleh karena hal tersebut, pembangunan pada tingkat kabupaten/kota menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan nasional (Arif dan Utomo, 2016). Percepatan pembangunan daerah yang paling efektif adalah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.

Konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial dalam suatu Negara menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses selektif di pandang dari dimensi geografis (Kuncoro, 2000:1; Wheeler & Muller, 1985:6; Eliot Hurst, 1972:316). Perubahan paradigma pembangunan di negara- negara sedang berkembang seperti Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi, telah menjadikan orientasi pembangunan yang semula pada sektor pertanian mulai tergantikan oleh industrialisasi (Soetrisno, 1999:1).

Kawasan “SUBOSUKAWONOSRATEN” (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) ialah kawasan yang menjadi salah satu koridor utama penyangga ekonomi propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari daerah penyangga ekonomi di Jawa Tengah.



Sumber: BPS Jawa Tengah dan Sukoharjo 2017

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 – 2016 (persen)

Gambar 1.1 menjelaskan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sukoharjo, dalam grafik tersebut terlihat bahwa Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, titik terendah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo terjadi pada tahun 2013 – 2014 dimana pertumbuhan hanya mencapai 5,4% sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami titik terendah pada tahun 2012 – 2013 yang hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%.

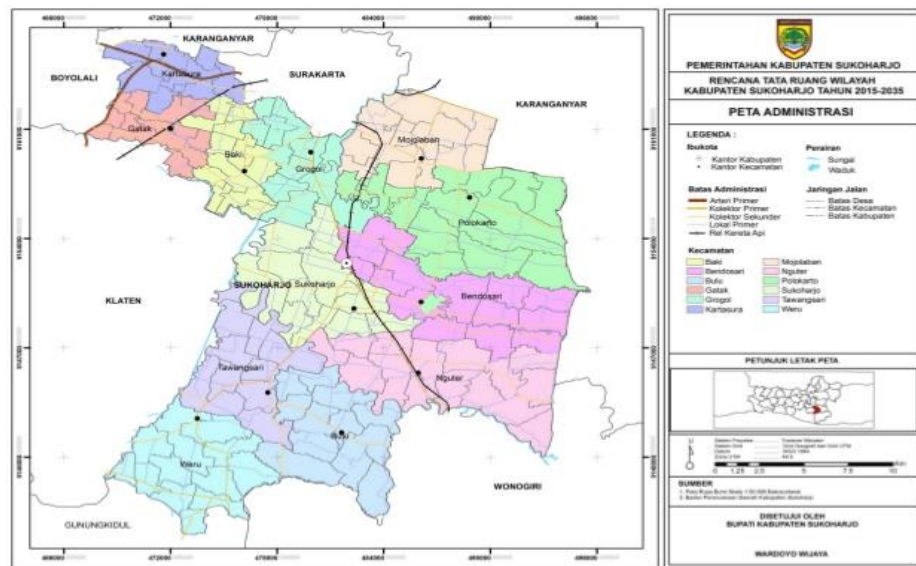
Tabel 1.1
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori PDRB	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.67	10.66	10.61	9.67	9.95	9.30
Pertambangan dan Penggalian	0.48	0.44	0.43	0.48	0.52	0.50
Industri Pengolahan	38.59	39.05	39.12	39.93	38.82	39.20
Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
Konstruksi	6.50	6.38	6.35	6.39	6.57	6.63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.80	18.54	18.13	17.66	17.68	17.53
Transportasi dan Pergudangan	3.04	2.88	2.94	3.09	3.22	3.22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.71	3.50	3.53	3.62	3.73	3.83
Informasi dan Komunikasi	3.92	3.85	3.85	4.05	4.16	4.19
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.89	3.87	3.81	3.67	3.82	3.95
Real Estate	2.27	2.14	2.14	2.19	2.24	2.24
Jasa Perusahaan	0.33	0.33	0.36	0.36	0.38	0.39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.52	2.54	2.50	2.39	2.39	2.40
Jasa Pendidikan	2.93	3.55	3.92	4.03	4.07	4.14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.77	0.83	0.85	0.91	0.96	0.96
Jasa lainnya	1.41	1.27	1.33	1.39	1.36	1.38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Sukoharjo 2017

Tabel 1.1 menjelaskan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 – 2016. terakhir sektor industri pengolahan masih merupakan *leading sector* yang memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Sektor industri pengolahan mampu memberikan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo sebesar 38,59% persen pada tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2014 yaitu mencapai pertumbuhan sebesar 39,93%. Besarnya distribusi

sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Sukoharjo perlu dipertahankan dan dinaikkan agar perekonomian di daerah Sukoharjo menjadi lebih maju, sehingga dapat mendorong maksimalnya produksi industri pengolahan. Hal tersebut didorong dengan distribusi dari sektor-sektor yang lainnya untuk menjadikan Sukoharjo wilayah yang maju.



Sumber: Pemkab Sukoharjo

Gambar 1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2035

Gambar 1.1 merupakan peta administrasi Kabupaten Sukoharjo tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merencanakan tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 – 2035 dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan berbagai aspek pertimbangan sehingga tergambar seperti peta administrasi diatas guna menciptakan keruangan yang teratur.

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo menurut Sektor dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No.	Jenis Sektor	Banyaknya Pekerja menurut Jenis Sektor dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	106	193	299
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
C	Industri Pengolahan	26.022	36.518	62.540
D	Listrik, Gas dan Air	384	221	605
E	Konstruksi	704	88	792
F	Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Tangga	4.044	1.953	5.997
G	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.019	30	1.049
H	Lembaga Keuangan, Real Estate Usaha Persewaan dan Jasa	1.035	250	1.285
I	Jasa Kemasyarakatan Sosial	3.179	2.389	5.568
J	Kegiatan yang belum jelas batasnya	0	0	0
Jumlah		36.493	41.642	78.135

Sumber : BPS Sukoharjo 2017

Tabel 1.2 merupakan jumlah tenaga kerja menurut sektor dan jenis kelamin di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016. Industri pengolahan mempunyai jumlah tenaga kerja tertinggi baik laki-laki maupun perempuan yaitu dengan jumlah total sebanyak 62.540 jiwa. Sektor perdagangan besar, eceran dan rumah tangga jumlahnya lebih rendah dari sektor pengolahan yaitu sebanyak 5.997 jiwa. Jasa kemasyarakatan sosial sebanyak 5.568 jiwa, lembaga keuangan, real estate usaha persewaan dan jasa sebanyak 1.285 jiwa, angkutan pergudangan dan komunikasi sebanyak 1.049 jiwa, konstruksi sebanyak 792 jiwa, pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 299 jiwa, listrik, gas dan air sebanyak 605 jiwa. Sektor yang tidak memiliki tenaga kerja yaitu pada sektor pertambangan dan sektor kegiatan yang belum jelas batasnya.

Tabel 1.3
Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo
menurut Golongan Industri tahun 2014-2015

No.	Golongan Industri	Kelompok Industri					
		IAHH		ITA		IKLME	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Besar	60	62	23	30	29	125
2	Menengah	155	162	62	70	84	320
3	Kecil	6.857	6.881	4.312	4.323	5.395	16.609
	Jumlah	7.072	7.105	4.397	4.423	5.508	17.054

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Sukoharjo 2017

Keterangan :

IAHH : Industri Agro dan Hasil Hutan

ITA : Industri Tekstil dan Aneka

IKLME : Industri Kimia, Logam, Mesin dan Elektro

Tabel 1.3 merupakan data Dinas Perindag Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 dan 2015. Industri kecil atau usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sukoharjo jumlahnya sangat banyak, dari industri agro dan hasil hutan, industri tekstil dan aneka dan industri kimia, logam, mesin dan elektro. Jumlah tertinggi yaitu industri kimia, logam, mesin dan elektro pada tahun 2015 yaitu sebanyak 16.609 usaha yang tahun sebelumnya hanya berjumlah 5.395 unit. Industri agro dan hasil hutan jumlahnya banyak setelah industri kimia, logam, mesin dan elektro yaitu sebanyak 6.857 unit usaha pada tahun 2014 dan 6.881 unit usaha pada tahun 2015. Industri tekstil dan aneka pada tahun 2014 sebanyak 4.312 unit dan tahun 2015 sebanyak 4.323 unit. Unit industri besar dan menengah jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan usaha kecil (usaha mikro, kecil dan menengah).

Tabel 1.4
Jumlah Unit, Tenaga Kerja dan Laba Usaha UMKM Sektor Industri
Makanan Kabupaten Sukoharjo 2016

Kecamatan	Jumlah Unit	Tenaga Kerja	Laba Usaha
Baki	62	133	Rp 456,500,000
Bendosari	49	119	Rp 312,490,000
Bulu	44	93	Rp 499,860,000
Gatak	111	199	Rp 748,300,000
Grogol	94	397	Rp 2,482,508,855
Kartasura	77	459	Rp 1,371,500,000
Mojolaban	210	793	Rp 4,107,900,000
Nguter	67	185	Rp 902,000,000
Polokarto	3	7	Rp 13,500,000
Sukoharjo	100	281	Rp 1,045,760,000
Tawang Sari	27	88	Rp 320,900,000
Weru	132	282	Rp 634,615,000

Sumber: Data Olah BPS Sukoharjo 2016

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sektor Industri Kecil dan Menengah sektor makanan di Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana pola distribusi spasial unit usaha mikro kecil dan menengah unggulan sektor makanan berdasarkan unit industri dan tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui usaha mikro kecil dan menengah unggulan sektor makanan Kabupaten Sukoharjo.

2. Menganalisis pola distribusi spasial unit usaha mikro kecil dan menengah unggulan sektor makanan Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo khususnya pada Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Sukoharjo.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi para peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Metodologi dalam studi ini menggunakan desain penelitian data sekunder hasil survey industri dan statistik daerah dalam angka hasil publikasi Dinas Perindustrian Dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo. Studi ini telah dilakukan dengan empat tahap, Tahap pertama mengklasifikasi UMKM sektor makanan, tahap kedua mengidentifikasi UMKM unggulan sektor makanan, tahap ketiga adalah mengetahui pola distribusi spasial UMKM unggulan sektor makanan Kabupaten Sukoharjo, dalam tahap ini

pendekatan dilakukan menggunakan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), data yang digunakan adalah jumlah unit usaha dan jumlah tenaga sektor UMKM unggulan sektor makanan Kabupaten Sukoharjo. Tahap keempat adalah menganalisis spesialisasi UMKM unggulan sektor makanan Kabupaten Sukoharjo.

2. Metode Analisis Data

a. Analisis Sektor Unggulan Industri Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil publikasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo.

b. Analisis Spasial Distribusi Wilayah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Unggulan

Untuk mendapatkan tampilan penyebaran usaha mikro, kecil dan menengah unggulan Kabupaten Sukoharjo analisis spasial geografis merupakan alat analisis yang sempurna. Dengan analisis spasial geografis dapat diketahui secara detail pola penyebaran industri kecil dan menengah unggulan tersebut. Dalam penelitian ini analisis spasial akan menggunakan analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). SIG merupakan alat analisis yang bermanfaat untuk: (1) mengidentifikasi lokasi industri; (2) di daerah mana mereka cenderung mengelompok secara spasial. Untuk menghasilkan hal tersebut langkah – langkah yang harus ditempuh adalah : Pertama, memberikan peringkat untuk seluruh Kecamatan di Sukoharjo berdasarkan unit usaha dan jumlah

tenaga kerja, peringkat ini adalah sebagai indikator ketidakmerataan lokasi geografis industri kecil dan menengah di Kabupaten Sukoharjo. Kedua, menyajikan data jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja dalam bentuk peta untuk menunjukkan dimana lokasi daerah industri dan daerah non industri, kemudian dibuat suatu kriteria tertentu yaitu; sangat tinggi, tinggi, menengah dan rendah berdasarkan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja yang dihasilkan oleh Kabupaten Sukoharjo. Data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis dalam pengolahannya yaitu; Persentase industri kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja, besarnya perusahaan industri kecil dan menengah sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja.

Penentuan skala industri kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini skala industri berdasarkan tenaga kerja diklasifikasikan menjadi dua yaitu industri kecil dan industri menengah, industri menengah memiliki tenaga kerja berkisar antara 20 hingga 99 pekerja dan industri kecil memiliki tenaga kerja lebih dari 1-5 pekerja.

c. Indeks penyerapan tenaga kerja

Indeks penyerapan tenaga kerja (*Concentration Indeks = CI*) adalah alat ukur untuk menguji pola konsentrasi geografis penyerapan tenaga kerja oleh IKM. Pengukuran CI dilakukan dengan membandingkan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah di suatu wilayah (Kecamatan) dengan jumlah

penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah di Kabupaten.

Daerah yang memiliki Indeks Konsentrasi lebih besar dari 1 ($CI > 1$), berarti kecamatan yang bersangkutan memiliki peran lebih besar daripada peran Kabupaten Sukoharjo dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah merupakan daerah yang memiliki indeks penyerapan tenaga kerja potensial karena di daerah tersebut merupakan basis penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah, dapat dinyatakan bahwa peran industri kecil dan menengah di kecamatan tersebut sangat signifikan sehingga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah.

Indeks Konsentrasi mengacu pada rasio angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk. Indeks konsentrasi merupakan salah satu alat ukur untuk menguji pola konsentrasi geografis, (LPEM, UI, 2003), dengan rumus sebagai berikut:

$$CI = \{(E_p/P_p)/(E_n/P_n)\}$$

Dimana:

$CI = \textit{Concentration Index}$

E_p = Tenaga kerja industri kecil dan menengah Kecamatan di Sukoharjo

E_n = Tenaga kerja industri kecil dan menengah Sukoharjo

P_p = Jumlah penduduk Kecamatan di Sukoharjo

P_n = Jumlah penduduk Sukoharjo

Apabila hasil Indeks Konsentrasi (CI) :

$CI > 1$: Kecamatan yang bersangkutan memiliki peran lebih besar daripada peran Sukoharjo dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah. Berarti industri kecil dan menengah sebagai aktivitas basis dalam perekonomian daerah tersebut.

$CI = 1$: Kecamatan yang bersangkutan memiliki peran sama dengan peran Sukoharjo dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah.

$CI < 1$: Kecamatan yang bersangkutan memiliki peran lebih kecil daripada peran Sukoharjo dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah. Berarti industri kecil dan menengah bukan merupakan aktivitas basis dalam perekonomian daerah tersebut.

F. Sistematika Penulisan**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan penjabaran landasan teori dan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan serta saran-saran yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**